



**Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SUMATERA SELATAN
Tahun Anggaran 2022**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Provinsi Sumatera Selatan

1. Sejarah Singkat Provinsi Sumatera Selatan

Pada Tahun 1950 dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan telah dibentuk Provinsi Otonomi Sumatera Selatan, yang wilayahnya meliputi Daerah Keresidenan Palembang, Keresidenan Bengkulu, Keresidenan Lampung dan Keresidenan Bangka Belitung dengan Ibukotanya berkedudukan di Kota Palembang.

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tanggal 26 Juni 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tersebut ditetapkan menjadi Undang-undang.

2. Data Geografis Wilayah

Provinsi Sumatera Selatan terletak antara 1°- 4° Lintang Selatan dan 102° - 106° Bujur Timur dengan batas administrasi :

1. Di sebelah Utara dengan Provinsi Jambi.
2. Di sebelah Selatan dengan Provinsi Lampung
3. Di sebelah Timur dengan Provinsi Bangka Belitung
4. Di sebelah Barat dengan Provinsi Bengkulu.

Adapun peta administrasi Provinsi Sumatera Selatan seperti tertera padagambar 1 berikut :

Gambar 1 Peta Administrasi Provinsi Sumatera Selatan



Luas wilayah Provinsi Sumatera Selatan adalah 91.592,43 Km² dengan rincian sebagaimana tertera pada tabel 1 :

Tabel 1 Luas Wilayah Provinsi Sumatera Selatan

NO	KABUPATEN/KOTA	LUAS WILAYAH KM2
1	OGAN KOMERING ULU	4.797,06
2	OGAN KOMERING ILIR	18.359,04
3	MUARA ENIM	7.383,90
4	LAHAT	5.311,74
5	MUSI RAWAS	6.350,10
6	MUSI BANYUASIN	14.266,26
7	BANYUASIN	11.832,99
8	OKU TIMUR	3.370,00
9	OKU SELATAN	5.493,94
10	OGAN ILIR	2.666,09
11	EMPAT LAWANG	2.256,44
12	PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	1.840,00
13	MUSI RAWAS UTARA	6.008,55

14	PALEMBANG	369,22
15	PAGAR ALAM	633,66
16	LUBUK LINGGAU	401,50
17	PRABUMULIH	251,94

Kawasan timur sampai garis pantai bagian daratan didominasi rawa-rawa dan lebak yang dipengaruhi pasang surut. Di bagian tengah dan makin ke barat merupakan dataran rendah dan lembah-lembah luas. Bagian Barat Sumatera Selatan terdiri dari perbukitan dan pegunungan yang merupakan mata rantai dari Bukit Barisan yang membentang di Pulau Sumatera mulai dari Aceh sampai Lampung. Puncak-puncak Bukit Barisan di Sumatera Selatan diantaranya adalah Gunung Dempo (3,159 M) Gunung Seminung (1.954 M), Gunung Patah (2.107M), Gunung Bungbuk (2.125 M). Dan lain-lain. Di kaki Gunung Seminung terdapat Danau Ranau yang luasnya 128 km² dengan panorama alam yang indah dan juga ideal untuk olahraga air seperti ski, menyelam, renang dan kano. Kawasan pegunungan dan perbukitan tersebut sebagian besar masih diselimuti hutan lebat sampai ke dataran rendah, umumnya berada pada ketinggian 900-1.200 M di atas permukaan laut. Kawasan ini juga merupakan sumber mata air utama dari sungai-sungai besar di Sumatera Selatan yang sebagian besar bermuara di Selat Bangka.

3. Pertumbuhan Penduduk

Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 91.592,43 Km² didiami penduduk pada tahun 2021 semester II (31 Desember 2022) sebanyak 8.755.074 jiwa. Penduduk ini tersebar di 17 Kabupaten / Kota, 241 Kecamatan dan 3.238 Desa/Kelurahan. Dengan jumlah penduduk laki-laki 4.458.667 jiwa dan

penduduk perempuan sebanyak 4.296.407 jiwa. Jumlah penduduk terbesar terdapat di Kota Palembang sebanyak 1.754.437 Jiwa, sedangkan penduduk terkecil terdapat di Kota Pagar Alam yaitu sebanyak 148.264 Jiwa, sebagaimana tertera pada tabel 2 dibawah :

**REKAPITULASI DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN
PER KECAMATAN (DAK-2)
PROVINSI SUMATERA SELATAN SEMESTER II (31 DESEMBER 2022)
PER KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI SUMATERA SELATAN**

NO	KABUPATEN /KOTA	JML KEC.	JML DESA/ KEL.	JUMLAH PENDUDUK			DATA KELUARGA
				LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
1	OGAN KOMERING ULU	13	157	192.867	184.110	376.977	114.402
2	OGAN KOMERING ILIR	18	327	394.776	373.045	767.821	253.288
3	MUARA ENIM	22	255	321.444	309.365	630.809	195.019
4	LAHAT	24	377	222.992	213.497	436.489	134.541
5	MUSI RAWAS	14	199	211.423	202.586	414.009	132.052
6	MUSI BANYUASIN	15	240	353.392	335.577	688.969	216.022
7	BANYUASIN	21	304	428.914	408.148	837.062	267.038
8	OKU TIMUR	20	312	344.922	329.044	673.966	212.589
9	OKU SELATAN	19	259	217.503	200.537	418.040	124.029
10	OGAN ILIR	16	241	218.652	212.906	431.558	132.796
11	EMPAT LAWANG	10	156	173.244	162.262	335.506	105.938
12	PALI	5	71	103.478	100.995	204.473	61.656
13	MUSI RAWAS UTARA	7	89	99.293	96.182	195.475	61.043
14	PALEMBANG	18	107	878.067	876.370	1.754.437	526.786
15	PAGAR ALAM	5	35	75.751	72.513	148.264	45.144
16	LUBUK LINGGAU	8	72	119.572	118.004	237.576	72.566
17	PRABUMULIH	6	37	102.377	101.266	203.643	61.260
	JUMLAH	241	3.238	4.458.667	4.296.407	8.755.074	2.716.169

Sumber Data : Hasil Konsolidasi dari Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI

B. Sejarah Singkat Berdirinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan, mempunyai tugas untuk memenuhi kebutuhan informasi kependudukan yang disajikan secara berkelanjutan yang memberikan gambaran tentang kependudukan di Provinsi Sumatera Selatan.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679). Pada Pasal 11 dan 12 yang intinya bahwa urusan Pemerintahan Kongkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar administrasi kependudukan dan pencatatan sipil termasuk Urusan Wajib Daerah Non Pelayanan Dasar sehingga harus berbentuk dinas. Selanjutnya Pasal 217 Dinas dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.

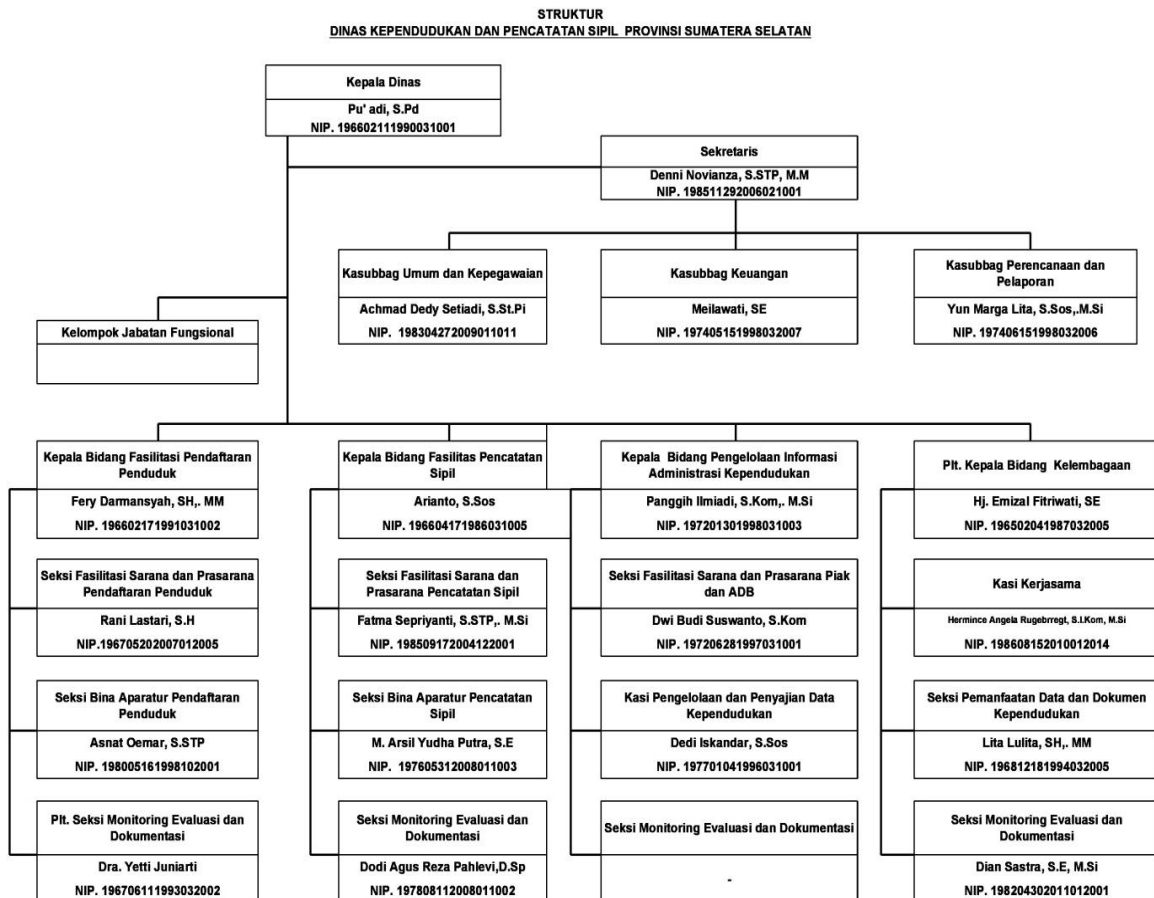
Menindaklanjuti Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan hasil Bimtek Pembentukan Type Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten/Kota pada tanggal 23 dan 24 Juni 2016 menjelaskan bahwa yang menangani urusan Kependudukan di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota harus dibentuk Dinas dengan nomenklatur yang sama diseluruh Indonesia sesuai dengan Permendagri Nomor 76 tahun 2015. Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan serta Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 49 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan maka dibentuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan terdiri atas 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat, 3 (tiga) Sub Bagian dan 4 (empat) Kepala Bidang dengan masing-masing terdiri atas 2 (dua) Kepala Seksi dengan type A pola minimal.

Hasil konsultasi dan koordinasi pada bulan Desember 2016 dengan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyarankan untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan agar membentuk struktur organisasi dengan Type A pola Maksimal.

Menindaklanjuti hasil konsultasi dan koordinasi tersebut maka keluarlah Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 49 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi

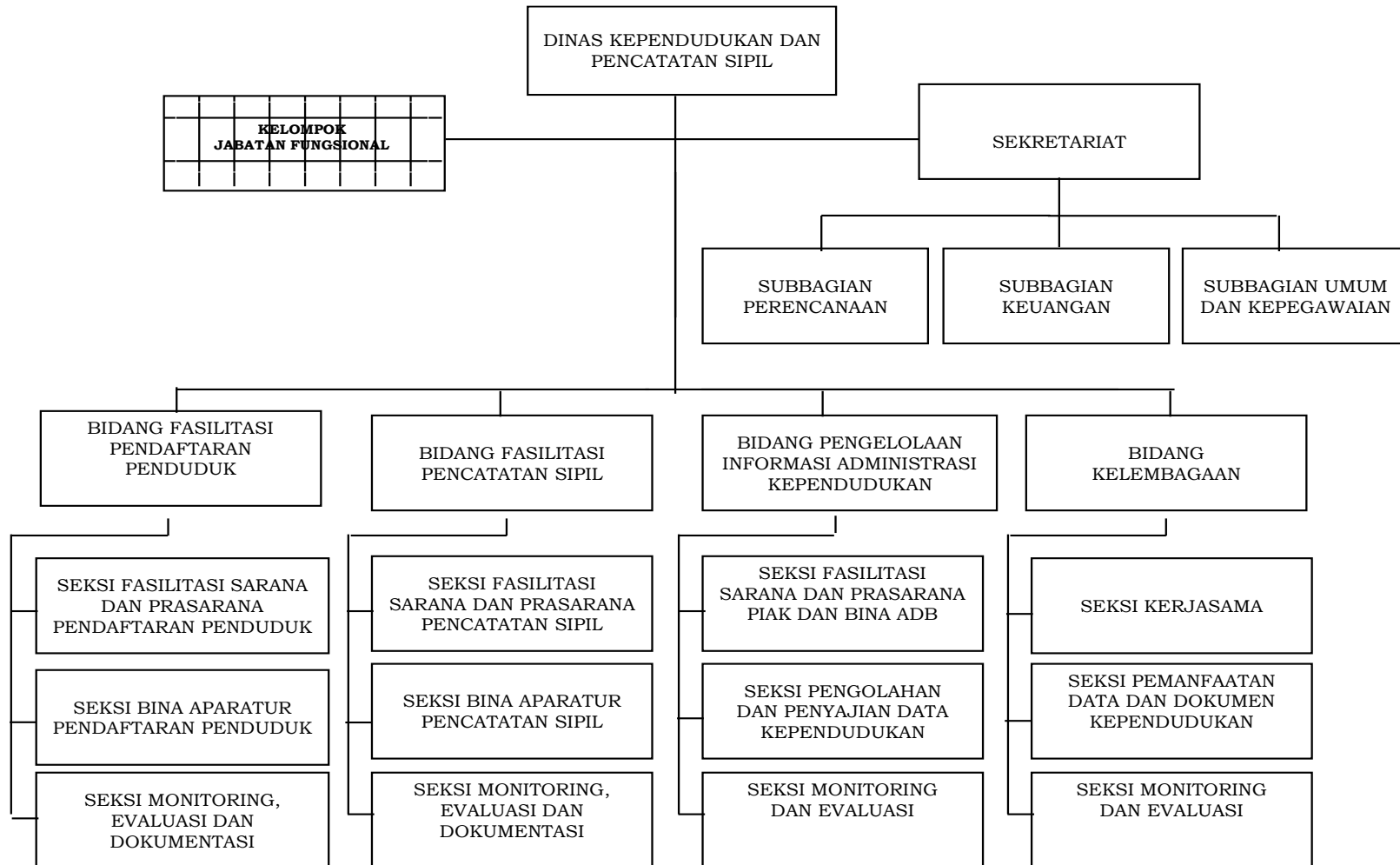
Sumatera Selatan yang terdiri atas 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Kepala Bidang dengan masing-masing terdiri atas 3 (tiga) Kepala Seksi/Sub Bagian.

Selengkapnya bagan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan seperti tertera pada gambar 2 ;



Gambar 2

Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan



C. Visi dan Misi

Setiap organisasi selalu memiliki cara pandang dan keinginan yang hendak diwujudkan. Cara pandang dan keinginan tersebut biasanya tertuang ke dalam visi organisasi. Namun demikian, visi masih bersifat umum yang harus dijabarkan ke dalam misi yang merupakan langkah-langkah operasional pencapaian visi. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sehubungan dengan Inpres tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan memiliki visi dan misi sebagai berikut;

Visi

“TERWUJUDNYA PENDUDUK YANG BERKUALITAS DAN BERTANGGUNGJAWAB MELALUI TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN”

Untuk memenuhi visi tersebut dijabarkan kedalam misi-misi yang dilaksanakan sebagai berikut :

Misi

1. Mewujudkan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil
2. Meningkatkan pengelolaan data kependudukan dan pencatatan sipil melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
3. Meningkatkan pembinaan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
4. Mengembangkan kerjasama kelembagaan dalam mendukung administrasi kependudukan

5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam memenuhi hak kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil guna memberikan kepastian dan perlindungan sesuai hak-hak penduduk.

D. Tugas Dan Tanggung Jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan

Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 6 Pemerintah Provinsi Berkewajiban dan Bertanggungjawab Menyelenggarakan Urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh Gubernur dengan kewenangan meliputi;

- a. Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan
- b. Pemberian bimbingan, supervise dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
- c. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan
- d. Melakukan kerjasama dengan Perangkat Daerah/Lembaga dalam hal Pemanfaatan Database Kependudukan dan Dokumen Kependudukan skala Provinsi berdasarkan Permendagri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Pemanfaatan Data Kependudukan).
- e. Melakukan pembinaan terhadap Administrator Database (ADB) dan Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan.
- f. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan Pejabat Struktural yang menangani Urusan Administrasi Kependudukan baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan (Permendagri Nomor 76 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat pada unit kerja yang menangani urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota).

- g. Penyajian data kependudukan berskala Provinsi berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri RI yang bertanggung jawab dalam Urusan Pemerintahan Dalam Negeri sebanyak 81 elemen data
- h. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

E. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan maka disusun program dan kegiatan sebagai berikut;

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
- Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- Fasilitas Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Pendaftaran Penduduk

a. Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan

- Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk

b. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan

- Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk

3. Program Pencatatan Sipil

a. Pelayanan Pencatatan Sipil

- Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil

b. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi

- Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil
- Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil

4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

a. Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

- Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

b. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi

- Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat
- Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan

c. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi

- Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan

5. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

a. Penyediaan Profil Kependudukan

- Penyediaan Data Kependudukan Provinsi
- Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3. 1 Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

1. Pelaksanaan Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan urusan Kependudukan dan Pencatatan sipil yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022, setelah perubahan adalah sebesar **Rp. 9.324.625.054,-** (*Sembilan milyar tiga ratus dua puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu lima puluh empat rupiah*) dengan **realisasi** sebesar **Rp. 8.437.056.328,-** (*delapan milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta lima puluh enam ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah*) atau (90,48%) yang terdiri dari **Belanja Operasi** sebesar **Rp. 8.602.925.054,-** (*delapan milyar enam ratus dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima puluh empat rupiah*) dengan **realisasi** sebesar **Rp. 7.775.356.328,-** (*tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus lima puluh enam ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah*) atau (**90%**) yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 5.280.672.000 (*lima milyar dua ratus delapan puluh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah*) realisasi sebesar Rp. 4.651.182.883,- (*empat milyar enam ratus lima puluh satu juta seratus delapan puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah*) atau sebesar (88%) dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 3.322.253.054,- (*tiga milyar tiga ratus dua puluh dua juta dua ratus lima puluh tiga ribu lima puluh empat rupiah*) realisasi sebesar Rp. 3.124.173.445,- (*tiga milyar seratus dua puluh empat juta seratus*

tujuh puluh tiga ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) dan **Belanja Modal** sebesar **Rp. 721.700.000,-** (*tujuh ratus dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah*) dengan **realisasi** sebesar **Rp. 661.700.000,-** (*enam ratus enam puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah*) atau **(91,69%)**

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi.

A. Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 14.990.500,- (*empat belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu lima ratus rupiah*) atau (99,94%). Hasil Kegiatan adalah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah berupa Dokumen Perencanaan yang Tercetak seperti Dokumen Rencana Strategis, Rencana Kerja, RKA, RKA-P, DPA, DPA-P, Rencana Aksi, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.

1.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan dengan alokasi anggaran sebesar 12.000.000,- (*dua rdua belas juta rupiah*) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.918.500,- (*enam juta Sembilan ratus delapan belas ribu*

lima ratus rupiah) atau (57,65%). Hasil Kegiatan adalah tersedianya Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran dan laporan koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD

1.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 176.378.103,- (*seratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tiga rupiah*) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 146.577.549,- (*seratus empat puluh enam juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah*) atau (83,10%). Hasil Kegiatan adalah tersedianya Dokumen Perubahan Rencana Kerja Anggaran dan Laporan Hasil Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

1.4 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.955.900,- (*empat belas juta sembilan ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp. 14.886.000,- (*empat belas juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah*) atau (99,53%). Hasil berupa Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Seperti Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), Laporan SAKIP, Evaluasi Renja dan laporan hasil Koordinasi dan

penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.193.192.000,- (*satu milyar seratus sembilan puluh tiga juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah*) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.563.702.883,- (*empat milyar lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus dua ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah*) atau (87,88%). Hasil Kegiatan adalah terbayarnya gaji dan tunjangan ASN guna dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran

2.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 87.480.000,- (*delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah*) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 87.480.000,- (*delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah*) atau (100%). Hasil Kegiatan adalah tersedianya dokumen penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD.

2.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan

dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.950.000,-, (*delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.944.600,- (*delapan juta Sembilan ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah*) atau (99,94%). Hasil Kegiatan adalah terselesainya laporan keuangan bulanan, triwulan dan semesteran tepat waktu.

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

3.1 Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.650.000,- (*tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp. 3.610.300,- (*tiga juta enam ratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah*) atau (98,91)%. Hasil Kegiatan adalah tersedianya buku laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

4.1 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) atau (100%). Hasil Kegiatan adalah Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang digunakan sebagai seragam dalam menunjang pelayanan dan sebagai identitas SKPD yang dapat

memberikan keseragaman dan keselarasan dalam penggunaannya di dinas kependudukan dan pencatatan sipil prov. sumsel dalam meningkatkan kepatuhan serta kedisiplinan pegawai.

4.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 29.345.810,-, (*dua puluh Sembilan juta tiga ratus empat puluh lima ribu delapan ratus sepuluh ribu rupiah*) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 22.930.675,- (*dua puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah*) atau (78,14%). Hasil Kegiatan adalah terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan system informasi kepegawaian guna meningkatkan pemahaman SDM Aparatur yang mengikuti Capacity Building tentang Perencanaan guna menunjang kinerja yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan.

4.3 Sub Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 327.768.000,-, (*tiga ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah*) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 327.601.645,- (*tiga ratus dua puluh tujuh juta enam ratus satu ribu enam ratus empat puluh lima rupiah*) atau (99,95%). Hasil Kegiatan adalah pencapaian hasil pelayanan adminduk yang telah mencapai target nasional sebanyak 14 kab/kota serta meminimalisir

pelanggaran dalam pelayanan adminduk dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada.

4.4 Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundangan-undangan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 169.147.651,- (*seratus enam puluh sembilan juta seratus empat puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh satu rupiah*) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 141.816.522,- (*seratus empat puluh satu ribu delapan ratus enam belas ribu lima ratus dua puluh dua rupiah*) atau (83,84%). Hasil Kegiatan adalah terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundangan-undangan guna meningkatkan pemahaman terhadap peraturan Perundangan-undangan.

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

5.1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 25.000.000,-, (*dua puluh lima juta rupiah*) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 24.848.500,- (*dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah*) atau (99,39%). Hasil Kegiatan adalah tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dalam memenuhi kebutuhan guna terlaksananya administrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

5.2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.244.970.226,- (dua ratus empat puluh empat juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu dua ratus *rupiah*) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 244.412.600,- (dua ratus empat puluh empat juta empat ratus dua belas ribu enam ratus *rupiah*) atau (99,77%). Hasil Kegiatan adalah tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor seperti kertas, tinta, pena buku dan sebagainya guna menunjang administrasi dan kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sumsel.

5.3 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 47.580.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu *rupiah*) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 45.913.000,- empat puluh lima juta Sembilan ratus tiga belas ribu *rupiah*) atau (96,50%). Hasil Kegiatan adalah peralatan rumah tangga seperti sabun, sapu, kain lap, tempat sampah dan sebagainya dalam kegiatan operasional perkantoran sehingga pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan yang ada.

5.4 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta *rupiah*) dengan realisasi anggaran sebesar

Rp. 43.653.950,- (*empat puluh tiga juta enam ratus lima puluh tiga ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah*) atau (87,31%). Hasil Kegiatan adalah tersedianya paket barang cetakan dan penggandaan sebagai pemenuh kebutuhan dalam pelayanan administrasi perkantoran serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk koordinasi dengan instansi terkait dalam menunjang kelancaran kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sumsel

5.5 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 25.272.000,- (*dua puluh lima juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah*) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 20.007.000,- (*dua puluh juta tujuh ribu rupiah*) atau (79,17%). Hasil Kegiatan tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan guna memberikan informasi terkini yang ada dan memberi pengetahuan kepada seluruh aparatur terhadap masalah yang ada baik masalah politik, sosial, regulasi dan budaya.

5.6 Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 28.000.000,- (*dua puluh delapan juta rupiah*) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 27.888.500,- (*dua puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah*) atau (99,60%). Hasil Kegiatan adalah

terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sumsel.

5.7 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 553.121.223,- (*lima ratus lima puluh tiga juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah*) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 527.399.586,- (*lima ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah*) atau (95,35%). Hasil Kegiatan adalah terlaksananya pembinaan ke Kab/Kota serta pendistribusian blangko KTP-el, pengawasan secara langsung perekaman e-ktp serta telah dilaksananya koordinasi ke Dirjen Dukcapil Kemendagri RI dalam pelaksanaan kegiatan disabilitas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sumsel

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

6.1 Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 577.200.000,- (*lima ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah*) dengan realisasi anggaran sebesar Rp 577.200.000,- (*lima ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah*) atau (100%).

Hasil Kegiatan adalah tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sumsel.

6.2 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 144.500.000,- (*seratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 84.500.000,- (*delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*) atau (58,48%). Hasil Kegiatan adalah tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya seperti laptop, Televisi, Soundsystem, printer.

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

7.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 6.000.000,- (*enam juta rupiah*) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.214.000,- (*dua juta dua ratus empat belas ribu rupiah*) atau (36,90%). Hasil Kegiatan adalah terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sumsel

7.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 169.000.000,- (*seratus enam puluh sembilan juta rupiah*) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 122.324.346,- (*seratus dua puluh dua*

juta tiga ratus dua puluh empat ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) atau (72,38%). Hasil Kegiatan adalah menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sumsel

7.3 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Umum Pelayanan Kantor yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 604.490.000,- (*enam ratus empat juta empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah*) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 604.270.000,- (*enam ratus empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah*) atau (99,96%). Hasil Kegiatan adalah terlaksananya pembayaran gaji honorer dan TKPD sehingga terpenuhinya kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan administrasi perkantoran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sumsel

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

8.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 8.000.000,- (*delapan juta rupiah*) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.762.000,- (*tiga juta tujuh ratus enam puluh*

dua ribu rupiah) atau (47,03%). Hasil Kegiatan adalah sebagai bukti tertib administrasi pajak kendaraan dalam menunjang pendapatan daerah, serta memberikan hasil untuk pendapatan daerah.

8.2Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 162.000.000,- (*seratus enam puluh dua ribu rupiah*) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 156.407.193,- (*seratus lima puluh enam juta empat ratus tujuh ribu seratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah*) atau (96,55%). Hasil Kegiatan adalah terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya yang dapat menunjang kelancaran kegiatan yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sumsel.

8.3Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.685.000 ,- (*dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah*) atau (53,70%). Hasil Kegiatan adalah tersedianya pemeliharaan instalasi listrik dan telepon, serta perbaikan gardu listrik utama pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sumsel.

8.4Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan dengan alokasi anggaran

Rp. 53.479.116,- (*lima puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu seratus enam belas rupiah*) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 52.855.715,- (*lima puluh dua juta delapan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima belas rupiah*) atau (98,83%). Hasil Kegiatan adalah terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sumsel

8.5 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 32.420.000,- (*tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah*) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 32.337.376,- (*tiga puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah*) atau (99,75%). Hasil Kegiatan adalah terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sumsel

2. Permasalahan dan Solusi

Pada program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi tahun anggaran 2022 telah terlaksana dengan baik dan tidak terdapat masalah.

II. Program Pendaftaran Penduduk

A. Pelaksanaa Kegiatan dan Sub Kegiatan

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

1.1 Sub Kegiatan Sosialisasi terkait pendaftaran penduduk yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 62.270.000,- (*enam puluh dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah*) dengan realisasi anggaran sebesar Rp.47.563.400, (*empat puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tiga ribu empat ratus rupiah*) atau (76,38%). Hasil kegiatan adalah terlaksananya sosialisasi terkait pendaftaran penduduk guna meningkatkan pemahamannya terkait pendaftaran penduduk.

2. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan

2.1 Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 31.274.925,- (*tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu Sembilan ratus dua puluh lima rupiah*) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 31.274.925,- (*tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu Sembilan ratus dua puluh lima rupiah*) atau (100%). Hasil Kegiatan tersedianya terlaksananya pembinaan dan pengawasan terkait pendaftaran penduduk.

B. Permasalahan dan Solusi

Pada program pendaftaran penduduk tahun anggaran 2022 telah terlaksana dengan baik dan tidak terdapat masalah.

III. Program Pencatatan Sipil

A. Pelaksanaan Kegiatan dan Sub Kegiatan

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi

1.1 Sub Kegiatan Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 56.864.500,-, (*lima puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah*) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 56.862.100,- (*lima puluh nam juta delapan ratus enam puluh dua ribu seratus rupiah*) atau (99,99%). Hasil Kegiatan adalah Jumlah SDM Pencatatan Sipil kab/kota dan instansi terkait yang terbina dengan baik.

1.2 Sub Kegiatan Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 61.107.375,-, (*enam puluh satu juta seratus tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah*) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 61.107.375,-, (*enam puluh satu juta seratus tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah*) atau (100%). Hasil Kegiatan adalah Jumlah SDM Pencatatan Sipil yang meningkat pemahamannya tentang perkawinan itsbth nikah sesuai dengan aturan yang berlaku.

B. Permasalahan dan Solusi

Pada program pencatatan sipil tahun anggaran 2022 telah terlaksana dengan baik dan tidak terdapat masalah.

IV. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

A. Pelaksanaan Kegiatan dan Sub Kegiatan

1. Kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi

1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 41.144.625,-. (*empat puluh satu juta seratus empat puluh empat ribu enam ratus dua puluh lima rupiah*) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 41.144.625,-. (*empat puluh satu juta seratus empat puluh empat ribu enam ratus dua puluh lima rupiah*) atau (100%). Hasil Kegiatan terbinanya SDM bidang pemanfaatan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se-Sumsel.

2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi

2.1 Sub Kegiatan Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan dengan alokasi

anggaran sebesar Rp. 39.995.125,-. (*tiga puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu seratus dua puluh lima rupiah*) dengan realisasi anggaran Rp. 39.995.125,-. (*tiga puluh sembilan juta Sembilan ratus sembilan puluh lima ribu seratus dua puluh lima rupiah*) atau (100%). Hasil Kegiatan terlaksananya Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan jumlah proposal yang mengikuti kompetensi inovasi pelayanan publik

2.2 Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 115.000.000,-. (*seratus lima belas juta rupiah*) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 104.024.813,- (*seratus empat juta dua puluh empat ribu delapan ratus tiga belas ribu rupiah*) atau (90,46%). Hasil Kegiatan tersedianya Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat dan 12 Top Inovasi KIPP (kompetensi inovasi pelayanan publik) kab/kota.

2.3 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 57.101.225,-, (*lima puluh tujuh juta seratus satu ribu dua ratus dua puluh dua ribu rupiah*) dengan realisasi Rp. 57.101.225,-, (*lima puluh tujuh juta seratus satu ribu dua ratus dua puluh dua ribu*

rupiah) atau (100%). Hasil Kegiatan adalah OPD Provinsi yang memanfaatkan data kependudukan.

3. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi

3.1 Sub Kegiatan Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 44.967.250,- (*tiga puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu seratus dua puluh lima rupiah*) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 44.967.250,- (*tiga puluh sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu seratus dua puluh lima rupiah*) atau (100%). Hasil kegiatan migrasi implementasi system informasi administrasi kependudukan terpusat

B. Permasalahan dan Solusi

Pada Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan tahun anggaran 2022 telah terlaksana dengan baik dan tidak terdapat masalah.

V. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

A. Pelaksanaan Kegiatan dan Sub Kegiatan

1. Kegiatan Penyediaan Profil Kependudukan;

1.1 Sub Kegiatan Penyediaan Data Kependudukan Provinsi yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.000.000,- (*tiga belas juta rupiah*) dengan realisasi anggaran

sebesar Rp. 12.926.900,- (*dua belas juta Sembilan ratus dua puluh enam ribu Sembilan ratus rupiah*) atau (99,44%). Hasil Kegiatan Buku Data Kependudukan yang dicetak

1.2 Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.000.000,- (*tiga belas juta rupiah*) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 12.950.650,- (*dua belas juta sembilan ratus lima puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah*) atau (99,62%). Hasil Kegiatan jumlah buku profil yang dicetak.

B. Permasalahan dan Solusi

Pada Program Pengelolaan Profil Kependudukan tahun anggaran 2022 telah terlaksana dengan baik dan tidak terdapat masalah.

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Pu'adi, S.Pd
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19660211 199003 1 001

BAB III PENUTUP

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2022 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan disampaikan sebagai wujud pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

Diharapkan melalui laporan yang telah kami susun ini dapat menjadi acuan dan informasi bagi semua pihak, baik di Pusat maupun di Daerah, agar dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, dapat lebih ditingkatkan lagi kinerjanya.